

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Agribisnis

Agribisnis sebagai proses aliran secara vertikal bergerak mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pengolahan, pemasaran sampai konsumen. Agribisnis dapat dibagi menjadi tiga sektor yang saling tergantung secara ekonomis, yaitu sektor masukan (*input*), produksi (*farm*), dan sektor keluaran (*output*). Ada pula yang mendefinisikan agribisnis menjadi dua yaitu produksi di lahan (*on farm*) dan aktivitas hilir (*off farm*). Agribisnis dapat pula dilihat sebagai suatu sistem (Lestari *et al.*, 2022).

Agribisnis adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir sektor pangan (*food supply chain*). Agribisnis adalah cara pandang ekonomi bagi usaha penyediaan pangan. Agribisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Dalam konteks manajemen agribisnis, setiap elemen dalam produksi dan distribusi pertanian adalah sebagai aktivitas agribisnis. Istilah agribisnis atau *agribusiness*, merupakan gabungan dari *agriculture* (pertanian) dan *business* (bisnis) (Arifin dan Biba, 2018).

Menurut Krisnamurthi, (2020) agribisnis adalah sistem rangkaian usaha-usaha mulai dari usaha pengadaan sarana produksi pertanian, usahatani, usaha pascapanen, usaha sortasi, penyimpanan dan pengemasan produk pertanian, usaha industri pengolahan produk pertanian, dan berbagai usaha menghantarkan produk pertanian sampai ke konsumen. Agribisnis adalah sejumlah usaha yang terangkai dalam suatu sistem dan terdiri atas beberapa subsistem. Sistem agribisnis mencakup empat subsistem yaitu :

1. Subsistem agribisnis hulu (*upstream agribusiness*), Kegiatan ekonomi yang menyediakan sarana produksi bagi pertanian, seperti industri dan perdagangan agrokimia (pupuk, pestisida, dll), industri agrootomotif (mesin dan peralatan), dan industri benih atau bibit.
2. Subsistem produksi atau usahatani (*on farm agribusiness*), kegiatan ekonomi

yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan oleh subsistem agribisnis hulu untuk menghasilkan produk pertanian primer. Termasuk ke dalam subsistem ini adalah usaha tanaman pangan, usaha tanaman hortikultura, usaha tanaman obat-obatan, usaha perkebunan, usaha perikanan, usaha peternakan, dan kehutanan.

3. Subsistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*), berupa kegiatan ekonomi yang mengolah produk pertanian primer menjadi produk olahan, baik produk antara maupun produk akhir, beserta kegiatan perdagangan di pasar domestik maupun di pasar internasional. Kegiatan ekonomi yang termasuk dalam subsistem agribisnis hilir ini antara lain adalah industri pengolahan makanan, industri pengolahan minuman, industri pengolahan serat (kayu, kulit, karet, sutera, jerami), industri jasa boga, industri farmasi dan bahan kecantikan, dan lain-lain beserta kegiatan perdagangannya.
4. Subsistem lembaga penunjang (*off farm*), seluruh kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis, seperti lembaga keuangan, lembaga pengkajian dan pengembangan, lembaga transportasi, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintah (kebijakan fiskal dan moneter, perdagangan internasional, kebijakan tata ruang, serta kebijakan lainnya).

Dari keempat subsistem tersebut apabila salah satu subsistem terganggu dan tidak dapat menjalankan sebagaimana fungsi utamanya, maka secara otomatis secara keseluruhan sistem agribisnis tersebut juga akan terganggu. Dengan demikian agribisnis dapat dikatakan sebagai sebuah sistem karena agribisnis memiliki hubungan dan saling berinteraksi antara komponen yang satu dengan yang lainnya dalam menjalankan kegiatan agribisnis (Arifin dan Biba, 2018).

2.1.2 Strategi

Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Dengan demikian strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan (Paroli, 2023).

Manajemen Strategi adalah suatu proses manajemen untuk mewujudkan visi dan misi organisasi, menjaga hubungan organisasi dengan lingkungan, terutama kepentingan para stakeholder, pemilihan strategi, pelaksanaan strategi dan pengendalian strategi untuk memastikan bahwa misi dan tujuan organisasi dapat tercapai. Pengertian lain manajemen strategis adalah serangkaian keputusan-keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan strategi sebagai berikut :

1. Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien
2. Mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi
3. Senantiasa memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal
4. Senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bisnis yang ada
5. Senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen

Manfaat manajemen strategi adalah dengan menggunakan manajemen strategik sebagai suatu kerangka (frame work) untuk menyelesaikan setiap masalah strategis di dalam perusahaan, terutama yang berkaitan dengan persaingan maka para manajer diajak untuk berfikir lebih kreatif atau berfikir strategik. beberapa manfaat yang diperoleh organisasi jika mereka menerapkan manajemen strategi yaitu :

1. Memberikan arah jangka panjang yang akan dituju
2. Membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi
3. Membuat surat suatu organisasi menjadi lebih efektif
4. Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko
5. Aktivitas. Pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa datang
6. Keterlibatan karyawan dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi

mereka pada tahap pelaksanaannya

7. Aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi
8. Keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi

Perumusan strategi adalah proses pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen yang efektif terhadap peluang dan ancaman yang muncul dari lingkungan, dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Setelah menilai ancaman yang dihadapi, peluang yang ada, serta kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, langkah selanjutnya adalah merumuskan strategi perusahaan (Paroli, 2023).

2.1.3 Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan produk utama perkebunan. Komoditas yang mengandung minyak sawit mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Perkebunan yang menghasilkan minyak sawit, salah satu tanaman penghasil minyak nabati dalam bentuk *Crude Palm Oil* (CPO), ditanam secara luas dan telah berkembang menjadi sumber hasil pertanian paling signifikan dan utama di negara Indonesia (Annisa dan Khadijah, 2024).

Selain menyediakan lapangan kerja dan menambah pendapatan bagi negara, perkebunan kelapa sawit mendukung pertumbuhan dan perkembangan bisnis berbasis kelapa sawit di Indonesia dan memberikan sumber pendapatan bagi petani. Pendapatan petani mungkin meningkat seiring dengan berdirinya perkebunan kelapa sawit. Penjualan buah kelapa sawit menghasilkan pendapatan besar bagi petani yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang luas. Keluarga yang menanam kelapa sawit menghadapi ketidakpastian ekonomi karena harga buah kelapa sawit di pasar terbuka sangat memengaruhi pendapatan mereka. Kemampuan keluarga dalam memenuhi biaya hidup sangat dipengaruhi oleh perubahan harga buah kelapa sawit (Annisa dan Khadijah, 2024).

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) merupakan salah satu palma yang menghasilkan minyak dengan tujuan komersil. Minyak sawit selain digunakan sebagai minyak makanan margarin, dapat juga digunakan untuk industri sabun, lilin dan dalam pembuatan lembaran-lembaran timah serta industri kosmetik. Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar kedua di dunia setelah Malaysia. Di Indonesia penyebaran kelapa sawit berada di daerah Aceh, pantai timur Sumatra,

Jawa, dan Sulawesi (Sulardi, 2022).

Menurut Indriarta, (2019) menyatakan dalam ilmu tumbuhan, tanaman kelapa sawit (*palm oil*) dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Divisi	: <i>Spermatophyta</i>
Kelas	: <i>Monocotyledoneae</i>
Ordo	: <i>Palmales</i>
Famili	: <i>Palmea</i>
Sub-Famili	: <i>Cocordae</i>
Genus	: <i>Elaeis</i>
Spesies	: <i>Elaeis gueneensis</i> Jacq.

Tanaman kelapa sawit berumah satu atau *monoecious* yang artinya bunga jantan dan betina terdapat pada satu pohon, sehingga penyerbukan dapat terjadi sendiri maupun silang. Morfologi tanaman kelapa sawit yakni, (Sulardi, 2022).

a. Akar

Berfungsi untuk menunjang struktur batang, menyerap unsur hara dan air dari dalam tanah dan sebagai salah satu alat respirasi. Sistem perakaran merupakan sistem serabut terdiri dari akar primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Masing-masing berukuran 6-10 mm, 2-4 mm, 0,7-1,2 mm, dan 0,2-0,8 mm. Akar kuarterner diasumsikan sebagai akar absorpsi utama (feeling root). Sistem perakaran yang aktif berada pada kedalaman 5-35 cm.

b. Batang

Berfungsi sebagai struktur pendukung daun, bunga dan buah, sebagai sistem pembuluh yang mengangkut air dan hara mineral dari akar ke atas serta hasil fotosintesis dari daun ke bawah serta kemungkinan juga sebagai organ penimbunan zat makanan. Pertambahan tinggi batang bisa mencapai 35-75 cm per tahun, panjang buku batang (internode) berkisar 14-33 mm. Batang diselubungi oleh pangkal pelepah daun tua sampai umur 11-15 tahun, bekas pangkal pelepah mulai rontok, mulai dari bagian tengah pokok meluas keatas dan kebawah.

c. Bunga

Tanaman kelapa sawit setelah ditanam dilapangan mulai berbunga pada umur 12-14 bulan, tergantung dari varietas dan tipe umur bibit ditanam dan juga kondisi lingkungan. Pada satu pohon kelapa sawit, dari setiap ketiak pelepah akan keluar

tandan bunga jantan dan tandan bunga betina. Pada saat tanaman mulai berbunga sering dijumpai bunga banci atau bunga hermaphrodit. Dalam satu tandan dijumpai bunga jantan dan bunga betina.

d. Buah

Buah akan matang 5-6 bulan setelah terjadi penyerbukan. Buah tersusun pada anak tandan (*spikelet*) dan karena kondisi yang terjepit maka buah yang terletak dibagian dalam akan lebih kecil dan kurang sempurna bentuknya, dibandingkan buah yang terletak dibagian luar. Kematangan buah, khususnya yang digunakan sebagai kriteria matang panen diperkebunan adalah lepasnya buah secara alami atau biasa disebut telah "membrondol". Buah-buah yang terlepas disebut "brondolan".

Dalam mengusahakan perkebunan sawit, sasarannya adalah keuntungan (*profitability*) dan sangat tergantung pada total bahan yang dihasilkan dan dapat dijual. Jadi jelas bahwa dari kebun kelapa sawit keuntungan akan diperoleh dari buah kelapa sawit. Komponen dari produksi kelapa sawit adalah total produksi TBS, jumlah minyak sawit dan inti sawit hasil ekstrasi dari TBS. Total produksi TBS setahun dipengaruhi rata-rata berat tandan dan jumlah tandan yang semuanya akan memengaruhi biaya panen (Sulardi, 2022).

2.1.4 Kelembagaan Ekonomi Petani

Kelembagaan pertanian merupakan norma yang terstruktur, terbentuk serta dilakukan secara kontinu guna mencukupi kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan bidang pertanian sebagai mata pencarian di wilayah pedesaan, kedudukan serta fungsi kelembagaan pertanian dalam komunitas petani merupakan bagian dari institusi sosial, dimana dapat mewedahi hubungan sosial dalam komunitas tersebut. Kelembagaan pertanian mempunyai peran strategis dalam mendorong terlaksananya sistem agribisnis di wilayah pedesaan, oleh karena itu, seluruh sumber daya yang tersedia di pedesaan harus diutamakan untuk meningkatkan profesionalisme dan daya tawar petani maupun kelompok tani (Barokatuminalloh *et al.*, 2023).

Kelembagaan ekonomi petani merupakan lembaga yang melakukan usaha pertanian yang didirikan oleh, dari, dan untuk petani dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum

maupun yang belum berbadan hukum. Kelembagaan ekonomi petani termasuk salah satu inovasi pemberdayaan petani untuk mengembangkan usaha tani yang dikelola secara profesional di bidang pertanian. Keberadaan kelembagaan ekonomi petani ditujukan untuk membentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan. Budaya petani dan potensi lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Barokatuminalloh *et al.*, 2023).

Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani mengatakan bahwa kelembagaan ekonomi petani adalah badan usaha milik petani dibentuk oleh, dari, dan untuk petani melalui Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gapoktan. Badan usaha milik tani berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan petani.

Menurut Pusat Penyuluhan Pertanian, indikator keberhasilan kelembagaan ekonomi petani, yaitu :

1. Berbadan usaha agribisnis, baik yang sudah berbadan hukum atau belum, sesuai dengan pilihan petani.
2. Sehat dalam keseluruhan aset perusahaan, baik dari aspek organisasi, usaha, keuangan, sosial, maupun sumber daya manusia (SDM).
3. Kepemilikan saham atau modal mayoritas berasal dari pelaku utama dan pelaku usaha sendiri.
4. Berkelanjutan dimana diperlukan kerjasama dan pendampingan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir oleh kementerian atau lembaga terkait.

Kementerian pertanian berperan dalam pendampingan teknologi budidaya dan pascapanen serta ketersediaan sarana produksi pertanian (saprotan). Perangkat desa berperan dalam pendampingan teknologi pascapanen. Kementerian Perindustrian berperan dalam pendampingan teknologi pengolahan hasil pertanian. Kementerian Perdagangan berperan dalam menyiapkan fasilitas logistik dan pemasaran. Lembaga keuangan berperan sebagai penyedia dana penyangga (Sariati dan Hayanti, 2023).

Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) terdiri atas kelembagaan ekonomi

yang belum berbadan hukum dan yang sudah berbadan hukum. KEP yang belum berbadan hukum adalah Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A), sedangkan kelembagaan ekonomi petani yang berbadan hukum adalah Koperasi Tani (Koptan) dan Perseroan Terbatas. Koperasi tani merupakan KEP berbadan hukum yang berwatak sosial, berlandaskan semangat gotong royong dan berasaskan kekeluargaan. Karakteristik koperasi tersebut mempunyai kesesuaian dengan kelembagaan petani yang menerapkan prinsip gotong-royong dan kekeluargaan dalam pengelolaannya (Suherlan, 2024).

2.1.5 Koperasi

Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial, koperasi sebagai perekonomian rakyat dilindungi oleh Undang-Undang, sebagai “Soko Guru Perekonomian Indonesia” dimana perekonomian diharapkan tumbuh dari bawah dengan kekuatan sendiri Hendrojogi, (2012) dalam Mulyadi *et al.*, (2023). Artinya, koperasi sebagai organisasi ekonomi dan sosial berusaha meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat sekitarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerjasama secara terus menerus (Mulyadi *et al.*, 2023).

Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah “badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan prinsip - prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa koperasi mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan sosial yang berkaitan satu sama lain Memiliki unsur ekonomi karena tujuan dari koperasi adalah untuk mencapai kesejahteraan anggota. Unsur sosial terlihat dari adanya asas yang dijunjung dalam koperasi, yakni asas kekeluargaan (Sary *et al.*, 2022).

Koperasi terdiri dari pengurus dan anggota, pengurus dan anggota bekerja sama untuk memajukan masyarakat dan kesejahteraan anggota. Landasan kerja sama koperasi didasarkan pada hak dan kewajiban yang disepakati dalam rapat anggota. Jenis koperasi dapat dibedakan dari kegiatan operasinya. Koperasi Unit Desa (KUD) adalah jenis koperasi yang umumnya didirikan untuk meningkatkan kondisi ekonomi desa. KUD merupakan badan usaha yang berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk membantu usaha-usaha masyarakat mendapatkan kemakmuran yang adil beradab (Hiedayat *et al.*, 2024).

Menurut Ikbaldin (2019) dalam Hiedayat *et al.*, (2024), matriks kesejahteraan anggota adalah sebagai berikut.

- a. Tingkat pendapatan keluarga,
- b. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk makanan dan non makanan,
- c. Tingkat Pendidikan, Kesehatan, dan kondisi perumahan serta fasilitas rumah tangga.

Kesejahteraan anggota akan dicapai apabila koperasi memenuhi kebutuhan anggota lebih dari itu. Koperasi harus dapat memberikan pendampingan moral dan nonmoral. Selain mendampingi, koperasi harus dikelola dengan baik. Jika koperasi tidak dikelola dengan baik, tidak hanya mengurangi hasil usaha, tetapi juga membuat anggota tidak percaya. Hal ini mengakibatkan mundurnya anggota dari waktu ke waktu. Karena pengelolaan yang buruk, aktivitas mundur anggota ini menunjukkan bahwa loyalitas anggota semakin menurun (Hiedayat *et al.*, 2024).

Secara konseptual koperasi harus menjaga identitas asli dalam setiap aktivitas diantaranya aktivitas kelembagaan, manajemen usaha, serta manajemen keuangan. Salah satu kegiatan koperasi yaitu sebagai fasilitator rantai pasok agribisnis, dimana peran koperasi harus fokus terhadap sistem kerjasama yang bersinergis dengan pemasok, konsumen, pesaing, dan kerjasama perusahaan dalam pengelolaan produksi (Muharani *et al.*, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, syarat pembentukan koperasi meliputi :

1. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang
2. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi
3. Pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar, yakni : daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, ketentuan mengenai rapat anggota, ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya, ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha dan ketentuan mengenai sanksi

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah, untuk mendapatkan pengesahan para pendiri

mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian koperasi. Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Bab 3 Pasal 4 tentang Perkoperasian, peran koperasi meliputi :

- a. Mengembangkan potensi ekonomi anggota dan masyarakat secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- b. Berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat.
- c. Menguatkan ekonomi rakyat sebagai fondasi kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional dengan koperasi sebagai pilar utamanya.
- d. Serta mendorong terwujudnya dan pengembangan perekonomian nasional melalui prinsip kerjasama berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan dan demokrasi Pancasila.

Jika peran koperasi diterapkan dengan baik, dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Koperasi dapat membantu meningkatkan pengetahuan tentang kewirausahaan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, koperasi dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi perkembangan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Hiedayat *et al.*, 2024).

Menurut Permenkop No 09 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi menyatakan Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan atau penerapan sanksi terhadap koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan kesehatan koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan koperasi dan penerapan sanksi.

Tahapan pengawasan koperasi meliputi :

- a) Persiapan pemeriksaan secara langsung
- b) Pelaksanaan pemeriksaan

- c) Pelaporan hasil pemeriksaan
- d) Penerapan sanksi administratif

Hasil pengawasan koperasi terdiri atas : 1) LHPKK dan, 2) sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran. LHPKK berisi dokumen laporan tertulis hasil pemeriksaan kesehatan koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan koperasi. Tingkat kesehatan koperasi sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- a. Sehat
- b. Cukup sehat
- c. Dalam pengawasan
- d. Dalam pengawasan khusus

Terhadap koperasi dengan tingkat kesehatan sehat atau cukup sehat sebagaimana di maksud diberikan sertifikat kesehatan. Terhadap koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud ditindaklanjuti dengan sanksi administratif. Jenis sanksi administratif dikategorikan sebagai berikut :

- a) Sanksi ringan berupa surat teguran
- b) Sanksi sedang berupa penurunan tingkat kesehatan koperasi, pembatasan kegiatan usaha koperasi, atau pembekuan izin usaha koperasi
- c) Sanksi berat berupa pencabutan izin usaha koperasi atau pembubaran koperasi.

Pemberian sanksi administratif dapat dilakukan :

- a. Berjenjang, secara berurutan mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat.
- b. Tidak berjenjang, diberikan sesuai dengan tingkat kewajaran terhadap pelanggaran yang dilakukan dan dampak yang terjadi dimasyarakat.
- c. Secara kumulatif, yang terdiri atas gabungan jenis sanksi administratif.

Surat keputusan sanksi administratif disampaikan kepada pengurus koperasi dan dilengkapi dengan tanda terima berupa dokumen tertulis atau dokumen elektronik sebagai dasar melaksanakan sanksi administratif. Pengurus koperasi wajib menyelesaikan seluruh sanksi administratif sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam surat keputusan sanksi administratif.

2.1.6 Pemetaan Potensi Lokal

Kemampuan yang dimiliki suatu desa yang mungkin untuk dikembangkan

tetap selamanya akan menjadi potensi bila tidak diolah, atau didayagunakan menjadi suatu realita berwujud pemanfaatan kepada masyarakat. Karena itu potensi wilayah memerlukan upaya-upaya tertentu untuk membuatnya bermanfaat kepada masyarakat (Endah, 2020). Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan seperti kekuatan, kesanggupan, dan daya yang bisa di kembangkan menjadi lebih besar. Istilah potensi tidak hanya ditunjukkan untuk manusia tetapi juga untuk entitas lain, seperti istilah potensi daerah, potensi wisata dan lain sebagainya Nurhayati (2017) dalam Endah (2020).

Menurut Soetomo (2014) dalam Endah (2020) diperlukan paling tidak 3 (tiga) hal dalam mengidentifikasi potensi lokal yaitu :

1. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan dan perubahan, sejalan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Sebagaimana menjadi cita-cita masyarakat.
2. Identifikasi potensi, sumberdaya dan peluang yang juga selalu berkembang. Tanpa adanya kegiatan tersebut maka potensi dan sumberdaya yang ada akan tetap bersifat terpendam dan tidak memberi gambaran langsung (teraktualisasi) bagi pemenuhan kebutuhan. Kegiatan identifikasi, perlu dilakukan sebagai salah satu pengetahuan dari prinsip pengutamaan potensi dan sumberdaya lokal dalam pemberdayaan masyarakat.
3. Proses dan upaya untuk mencari cara yang lebih menguntungkan dalam memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada. Melalui proses belajar sosial dan proses adaptasi dengan lingkungannya, masyarakat akan menemukan cara dan pengetahuan tentang pemanfaatan sumberdaya yang tersedia.

Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan ekonomi lokal, adalah upaya penyederhanaan dan peningkatan ektifitas lembaga ekonomi lokal dengan melibatkan peran masyarakat lokal terhadap lembaga ekonomi (Chawa *et al.*, 2020). Menurut Mulyani *et al.*, (2016) potensi kapasitas lokal dalam pemberdayaan kelembagaan ekonomi petani dapat diketahui melalui hasil identifikasi kapasitas lokal yang ditinjau berdasarkan dimensi :

1. Kapasitas Pengetahuan Lokal

Dimensi kapasitas pengetahuan lokal adalah pengetahuan yang mengakar secara turun-temurun dalam kehidupan sosial masyarakat. Kapasitas pengetahuan

lokal terkait pemberdayaan kelembagaan ekonomi petani berdasarkan beberapa aspek :

- a. Aspek pendidikan, terdiri dari komposisi tingkat pendidikan petani Dalam Perundang-undangan tentang Sistem Pendidikan No. 20 tahun 2003, mengatakan bahwa pendidikan merupakan “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepirtual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat” (Pristiwanti *et al.*, 2023).
- b. Aspek kesehatan, terdiri dari jenis penyakit yang sering diderita oleh masyarakat. Sehat adalah suatu keadaan tubuh dimana sehat rohani, jasmani, dan sosialnya. Dalam arti kata tidak ada satu pun hal yang buruk dalam diri kita. Sehat menurut UU No. 3 tahun 1961 adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan dengan selaras dengan keadaan orang lain. Sakit adalah suatu keadaan tubuh yang mengalami gangguan baik jasmani, rohani, dan sosialnya, yang disebabkan oleh faktor kelalaian, keturunan, dan faktor alam. Sakit adalah gangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas termasuk keadaan organisme sebagai sistem biologis dan penyesuaian sosialnya (Ismadi, 2023).
- c. Aspek infrastruktur dan fasilitas umum. Infrastuktur adalah suatu prasarana umum fundamental yang disediakan untuk memudahkan segala kegiatan masyarakat dan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Pada umumnya infrastruktur memiliki pengertian segala jenis sarana yang diperlukan masyarakat untuk membantu mempermudah kegiatan atau aktivitas masyarakat. Infrastruktur merupakan seluruh fasilitas fisik maupun fasilitas non fisik yang dibangun atau diperbaiki oleh pihak pemerintahan maupun swasta (perorangan) dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pada lingkung ekonomi maupun sosial (Hayati, 2022).

2. Aktor atau Pelaku

Dimensi aktor atau pelaku yang dimaksud adalah orang yang menguasai

persoalan sosial budaya dan dinamika masyarakat.

- a. Pemimpin Formal, kepemimpinan formal adalah jabatan yang dimiliki seseorang dalam kemampuannya meliputi proses memengaruhi orang lain dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, memengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Dimana kepemimpinan formal dalam jabatannya diperoleh dari suatu usaha tertentu dalam pencapaiannya. Pemimpin formal adalah pemimpin yang dipilih secara legalitas atau yang diberi wewenang dan kekuasaan yang sesuai dengan prestasi yang dimilikinya (Wirasandi, 2016).
- b. Pemimpin Nonformal, pemimpin nonformal adalah pemimpin yang tidak diangkat secara resmi berdasarkan surat keputusan tertentu. Dia memperoleh kekuasaan atau wewenang karena pengaruhnya terhadap kelompok. Tidak ada ukuran objektif tentang bagaimana seorang pemimpin nonformal dijadikan pemimpin. Dasarnya hanyalah oleh karena dia pernah benar dalam hal tertentu, maka besar kemungkinan dia akan benar pula dalam hal tersebut pada kesempatan lain. Dari hal tersebut maka pemimpin nonformal adalah pemimpin yang dipilih secara legitimitas atau yang diberi wewenang dan kekuasaan yang berdasar pada ikatan psikologis (Wirasandi, 2016).
- c. Tokoh Adat, tokoh adat atau merupakan pemimpin masyarakat baik formal maupun nonformal. Mereka di tokohkan karena memiliki pengaruh atau wibawa dihadapan para masyarakatnya. Para tokoh dapat melakukan peranan pengendalian sosial terhadap warga masyarakat. Tokoh adat menjadi bagian terpenting dalam sebuah kelompok masyarakat dimana tokoh menjadi sosok yang dituakan serta dapat memberikan peranan sebagai pemimpin dan sebagai pengawas dalam sebuah kegiatan di masyarakat (Rusiana, 2024).
- d. Tokoh Agama, tokoh agama adalah seseorang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian dibidang agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat di jadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya. Kepemimpinan tokoh agama di dalam sosial masyarakat memberi pengaruh berupa sugesti, larangan dan dukungan pemahaman keilmuan kepada masyarakat luas untuk menggerakkan atau melakukan sesuatu (Uzma, 2019).

- e. Tokoh Pemuda, pemuda adalah suatu generasi yang dipundaknya dibebani bermacam-macam harapan. Hal ini dapat dimengerti karena pemuda diharapkan sebagai generasi penerus, generasi yang harus mengisi dan melangsungkan estafet pembangunan secara berkelanjutan. Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa datang (Pinilas *et al.*, 2017).

3. Sistem Sosial yang Berasal dari Komunitas atau Kelembagaan Petani

- a. Sistem Kekerabatan, adalah sistem turun temurun yang dianut oleh kelompok etnis tertentu berdasarkan garis keturunan ayah, ibu atau keduanya. Kekerabatan merupakan prinsip utama dalam mengelompokkan tiap individu ke dalam kelompok sosial berdasarkan kategori, garis keturunan, dan kedudukan. Setiap anggota keluarga memiliki peran, tanggung jawab, dan kedudukan yang tidak sama satu sama lain. Bentuk kekerabatan lain, banyak yang beranggapan tidak harus bergantung dengan pertalian darah atau keturunan, akan tetapi telah menganut aliran bebas kepada siapapun yang dikehendaki untuk menjadi saudara tanpa terikat dengan hukum adat setempat (Suwarno *et al.*, 2022).
- b. Pertemanan, yaitu hubungan “akrab” antara seseorang dengan orang lainnya. Teman merupakan salah satu yang berpengaruh besar terhadap perilaku dan corak kehidupan seseorang. Suatu pertemanan akan menimbulkan kebaikan dan keburukan sekaligus. Maksudnya jika kita berteman dengan orang baik maka kita akan terpengaruh menjadi orang yang baik pula, sebaliknya jika kita berteman dengan orang yang buruk maka kita terpengaruh menjadi orang yang buruk pula (Rozi dan Jannah, 2021).
- c. Kelembagaan lokal, merupakan sebuah organisasi yang terbentuk dalam lokalitas tertentu untuk melayani kebutuhan anggotanya. Lembaga-lembaga lokal sendiri dapat bervariasi bentuknya contohnya seperti institusi pemerintah, organisasi nirlaba, bisnis, atau bahkan lembaga pendidikan. Lembaga lokal menyediakan layanan sosial bermanfaat bagi komunitas lokal, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, pembangunan ekonomi, dan keamanan

publik. Tujuan utama berdirinya sebuah lembaga lokal adalah guna memenuhi kebutuhan komunitasnya secara khusus serta menciptakan kesejahteraan didalamnya (Huda, 2020).

2.1.7 Analisis Stakeholders

Para pemangku kepentingan memiliki pengaruh yang penting demi kelangsungan sebuah organisasi atau lembaga. Para pemangku kepentingan biasanya disebut dengan istilah *stakeholders*. *Stakeholders* merupakan sebuah frasa yang terbentuk dari 2 kata yaitu kata *stake* dan *holder*. Secara garis besar istilah *stakeholders* memiliki makna sebagai seorang individu, kelompok maupun organisasi yang memiliki kepentingan tertentu dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau dipengaruhi di dalam sebuah lingkungan internal maupun eksternal organisasi tersebut. *Stakeholders* biasanya memiliki hubungan keterkaitan dan kemampuan untuk memengaruhi ataupun dipengaruhi baik dalam lingkup internal atau eksternal (Ariyanto dan Marom, 2020).

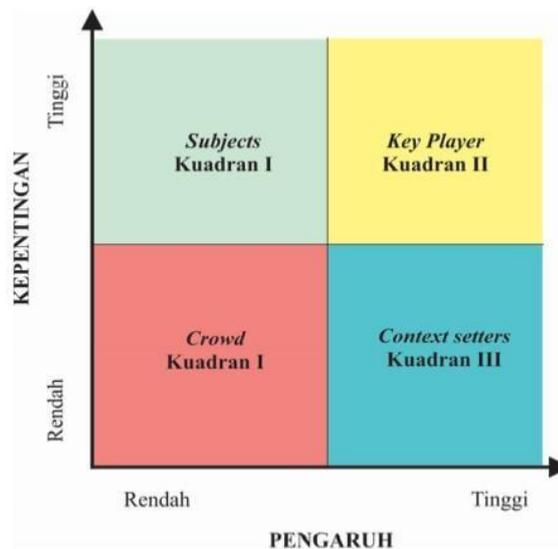
Stakeholders adalah semua lapisan masyarakat yang memiliki kepentingan dan keterlibatan secara langsung dengan suatu kegiatan atau program pembangunan, dan keterlibatan tersebut memberikan pengaruh terhadap suatu program pembangunan baik secara langsung maupun tidak (Talib, 2020). Menurut Maryono dalam Ariyanto dan Marom (2020) terdapat tiga jenis *stakeholders* yaitu,

- a. *Stakeholders* primer, yaitu *stakeholders* yang menerima dampak langsung dari suatu rencana atau kegiatan tertentu, dampak tersebut dapat berupa dampak yang bersifat positif dan negatif, *stakeholders* ini biasanya banyak terlibat di dalam proses awal hingga akhir sebuah kegiatan.
- b. *Stakeholders* kunci, yaitu *stakeholders* yang memiliki kewenangan dan pengaruh yang besar terhadap proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi atau kegiatan karenanya merekalah yang biasanya bertanggung jawab atas kegiatan secara penuh.
- c. *Stakeholders* sekunder, yaitu *stakeholders* pendukung biasanya mereka tidak terlibat secara langsung di dalam sebuah organisasi atau kegiatan tertentu karena mereka tidak memiliki kepentingan dan pengaruh secara langsung dalam program tetapi mereka memiliki peran dalam mendukung dan memberi

saran atau masukan terhadap sebuah program.

Menurut Gardener *et al.*, dalam Nugroho (2019) klasifikasi *stakeholders* apabila dianalisis menurut tingkat kepentingan dan pengaruh yaitu :

- a. Subjek (*Subjects*) merupakan *stakeholders* dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah.
- b. Pemain Kunci (*Key Players*) merupakan *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi.
- c. Pengikut Lain (*Crowd*) merupakan *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah.
- d. Pendukung (*Context setters*) merupakan *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan yang rendah tetapi memiliki pengaruh yang tinggi.



Gambar 1. Pemetaan Stakeholders

Sumber : Nur & Sarwadi (2021)

Menurut Nugroho (2014) dalam Ariyanto dan Marom (2020) peran *stakeholders* antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pembuat kebijakan (*Policy Creator*) adalah *stakeholders* yang berperan dalam proses pengambilan keputusan dan penentu dalam kebijakan tertentu.
- b. Koordinator adalah *stakeholders* yang berperan untuk mengkoordinasikan program kepada pemangku kepentingan lainnya yang terlibat.
- c. Fasilitator adalah *stakeholders* yang berperan dalam memfasilitasi kepentingan pemangku kepentingan lainnya terhadap sebuah program secara fisik maupun non fisik.

- d. Implementor adalah *stakeholders* yang memiliki tugas sebagai bagian pelaksanaan kegiatan atau program sesuai dengan kebijakan atau keputusan yang telah ditentukan kepada kelompok sasaran.
- e. Akselerator adalah *stakeholders* yang berperan untuk mendukung pelaksanaan program agar dapat efektif dan efisien sehingga dapat tercapai sesuai dengan target serta tujuan yang telah diharapkan.

Analisis *stakeholders* adalah sebuah proses memetakan posisi *stakeholders* terhadap kegiatan yang akan dijalankan atau dirancang oleh organisasi publik, melakukan analisis *stakeholders* sangat penting untuk dilakukan dalam rangka mengetahui siapa-siapa saja atau pihak mana saja yang akan bekerja sama dalam mewujudkan sebuah tujuan kebijakan atau program (Ariyanto & Marom, 2020).

Menurut Wisnubroto *dalam* Ariyanto dan Marom (2020) beberapa manfaat analisis *stakeholders* yakni :

1. Meningkatkan keberhasilan program.
2. Meminimalisir berbagai risiko yang akan dihadapi seperti, penolakan terhadap program atau perubahan.
3. Menjembatani modal sosial yang dapat berperan positif.
4. Mendapatkan lebih banyak gagasan pengembangan dan perubahan.
5. Memberikan sebuah gambaran yang jelas terkait sasaran, potensi dan tantangan program.

2.1.8 Analisis SWOT

Menurut Rangkuti (2016) *Strengths, Weakness, Opportunities, Threats* (SWOT) adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).

SWOT adalah metode perencanaan model, strategis, dan pengembangan usaha yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Analisis SWOT digunakan untuk membandingkan faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman, sedangkan faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Proses penggunaan

manajemen analisis SWOT menghendaki adanya survei internal tentang kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) program, serta survei eksternal atas ancaman (*opportunities*) dan peluang atau kesempatan (*treats*). Pengujian eksternal dan internal yang terstruktur adalah sesuatu yang unik dalam dunia perencanaan dan pengembangan. Fungsi dari analisis SWOT adalah untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman) (Wiswasta et al., 2018).

Analisis SWOT merupakan singkatan dari *Strength*, *Weaknesses*, *Opportunities* dan *Threat* dimana penjelasannya sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan (*Strength*) adalah suatu sumberdaya keterampilan atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani oleh perusahaan atau organisasi. Kekuatan adalah suatu kompetensi khusus yang memberikan keunggulan komparatif bagi perusahaan di pasar. Kekuatan dapat terkandung dalam sumber daya keuangan, citra, kepemimpinan pasar, hubungan pembeli dengan pemasok dan faktor-faktor lain.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan (*Weakness*) adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumberdaya, keterampilan dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan atau organisasi. Fasilitas sumber daya keuangan, kapabilitas manajemen, keterampilan pemasaran, citra *merk* dapat merupakan sumber kelemahan.

3. Peluang (*Opportunity*)

Peluang (*Opportunity*) adalah situasi penting yang menguntungkan dalam suatu lingkungan perusahaan ataupun organisasi. Kecenderungan-kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang.

4. Ancaman (*Threat*)

Ancaman (*Threat*) adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan ataupun organisasi. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang yang diinginkan organisasi. Dengan masuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan pasar, meningkatnya kekuatan tawar-menawar

pembeli atau pemasok penting, perubahan teknologi serta peraturan baru atau yang direvisi dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan perusahaan (Kurniasih *et al.*, 2021).

Menurut Fahmi (2013) dalam Kurniasih *et al* (2021) menyatakan bahwa untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan internal sebagai bagian penting dalam analisis SWOT, yaitu:

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini memengaruhi terbentuknya *opportunities* dan *threats*. Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan ataupun organisasi yang memengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan atau organisasi. Faktor ini mencakup lingkungan industri dan lingkungan bisnis makro, ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya.

2. Faktor Internal

Faktor internal ini memengaruhi terbentuknya *strengths* and *weakness*. Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi, yang mana ini turut memengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan (*decision making*) perusahaan atau organisasi. Faktor internal ini meliputi semua macam manajemen fungsional pemasaran, keuangan, sumberdaya manusia, pengkajian dan pengembangan, sistem informasi manajemen dan budaya perusahaan (*corporate culture*).

Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan. Faktor internal dimasukkan ke dalam matriks yang disebut matriks faktor strategi internal atau *Internal Strategic Factor Analisis Summary* (IFAS). Faktor eksternal dimasukkan ke dalam matriks yang disebut matriks faktor strategi eksternal atau *Eksternal Strategic Factor Analisis Summary* (EFAS). Setelah matriks faktor strategi internal dan eksternal selesai disusun, kemudian hasilnya dimasukkan dalam model kuantitatif, yaitu matrik SWOT untuk merumuskan strategi kompetitif perusahaan (Hidayat *et al.*, 2024).

2.2 Pengkajian Terdahulu

Dalam rangka mendukung pengkajian ini, terdapat beberapa hasil

pengkajian terdahulu yang berkaitan dan dapat di lihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pengkajian Terdahulu

No	Judul	Tujuan Pengkajian	Metode Pengkajian	Kesimpulan
1.	Strategi pengembangan kelembagaan koperasi petani jeruk Pamelolo di Desa Tambakmas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. (Wijaya <i>et al.</i> , 2020)	Pengkajian ini bertujuan untuk: -Mengembangkan koperasi petani jeruk Pamelolo di Desa Tambakmas, Kecamatan Sukomoro, -Meningkatkan posisi tawar petani melalui penguatan kelembagaan. -Mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang dihadapi oleh petani dalam pengembangan agribisnis jeruk pamelolo. -Merumuskan strategi yang efektif untuk memperkuat kinerja kelompok tani menuju pengembangan koperasi berbasis komoditas unggulan.	Metode pengkajian yang digunakan Pendekatan Kualitatif: pengkajian ini menggunakan analisis SWOT (<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats</i>) untuk merumuskan strategi pengembangan kelembagaan Gapoktan.	Hasil dari pengkajian ini adalah : Posisi Kelembagaan: Gapoktan di Desa Tambakmas memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan kelemahan, dengan skor IFAS + 1,07 dan EFAS +1,10. Hal ini menunjukkan potensi yang baik untuk pengembangan koperasi.
2.	Strategi pengembangan koperasi unit desa (KUD) Hikmat Kelurahan Molosipat U Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo (Rasyid <i>et al.</i> , 2023)	Pengkajian ini bertujuan untuk: Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) Hikmat di Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Merumuskan strategi pengembangan	Metode yang Digunakan dalam Pengkajian ini adalah: Metode Deskriptif: Untuk mendeskripsikan kondisi wilayah berdasarkan masalah yang ditemukan. Menggunakan analisis SWOT Untuk menilai kekuatan, kelemahan,	Hasil pengkajian menunjukkan bahwa: Koperasi Unit Desa Hikmat memiliki kekuatan seperti lokasi strategis, rapat yang teratur, dan jenis usaha yang unik. Namun, terdapat kelemahan seperti kurangnya variasi usaha dan pemahaman teknologi. Peluang untuk pengembangan koperasi termasuk peningkatan jumlah anggota dan kerjasama dengan pihak lain. Namun,

Lanjutan Tabel 1

		Koperasi Unit Desa (KUD) Hikmat untuk meningkatkan usaha koperasi.	peluang, dan ancaman dalam pengembangan koperasi.	terdapat ancaman dari persaingan usaha sejenis dan potensi kredit macet.
3.	Analisis peran <i>stakeholders</i> dalam program pilah sampah di Kelurahan Mangkang Kulon, kecamatan Tugu, Kota Semarang (Ariyanto & Maron, 2020)	Pengkajian ini bertujuan untuk : - Menganalisis peran <i>stakeholders</i> dalam program pilah sampah di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. -Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pilah sampah serta hambatan-hambatan yang dihadapi.	Metode pengkajian yang digunakan dalam pengkajian ini adalah: Pendekatan Metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Analisis Data: Menggunakan analisis <i>stakeholders</i> untuk	Peran <i>stakeholders</i> : <i>stakeholders</i> dalam program pilah sampah meliputi masyarakat sebagai implementor, Bank Sampah Karya Melati dan KSM sebagai koordinator, serta Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah sebagai fasilitator dan pembuat kebijakan.
4.	Analisis peran <i>stakeholders</i> dalam pengembangan destinasi wisata (Talib, 2020)	Pengkajian ini bertujuan untuk : - Menganalisis peran <i>stakeholders</i> dalam pengembangan destinasi wisata di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. - mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan destinasi wisata serta kendala yang dihadapi	Metode pengkajian - Pendekatan: menggunakan metode deskriptif dengan studi kasus. Analisis Data: Menggunakan teknik analisis reduksi data, penyajian data, kesimpulan, dan verifikasi data serta menguji keabsahan data melalui kredibilitas, transferability, dependability, dan confirmability	Hasil pengkajian - Peran <i>stakeholders</i> : <i>stakeholders</i> utama dalam pengembangan destinasi wisata meliputi masyarakat sebagai pelaksana, pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan, serta sektor swasta dan akademisi sebagai pendukung
5.	Analisis potensi kapasitas	pengkajian ini bertujuan untuk : - Menganalisis	Metode pengkajian - Pendekatan:	Hasil pengkajian - Kapasitas Pengetahuan Lokal: pengkajian

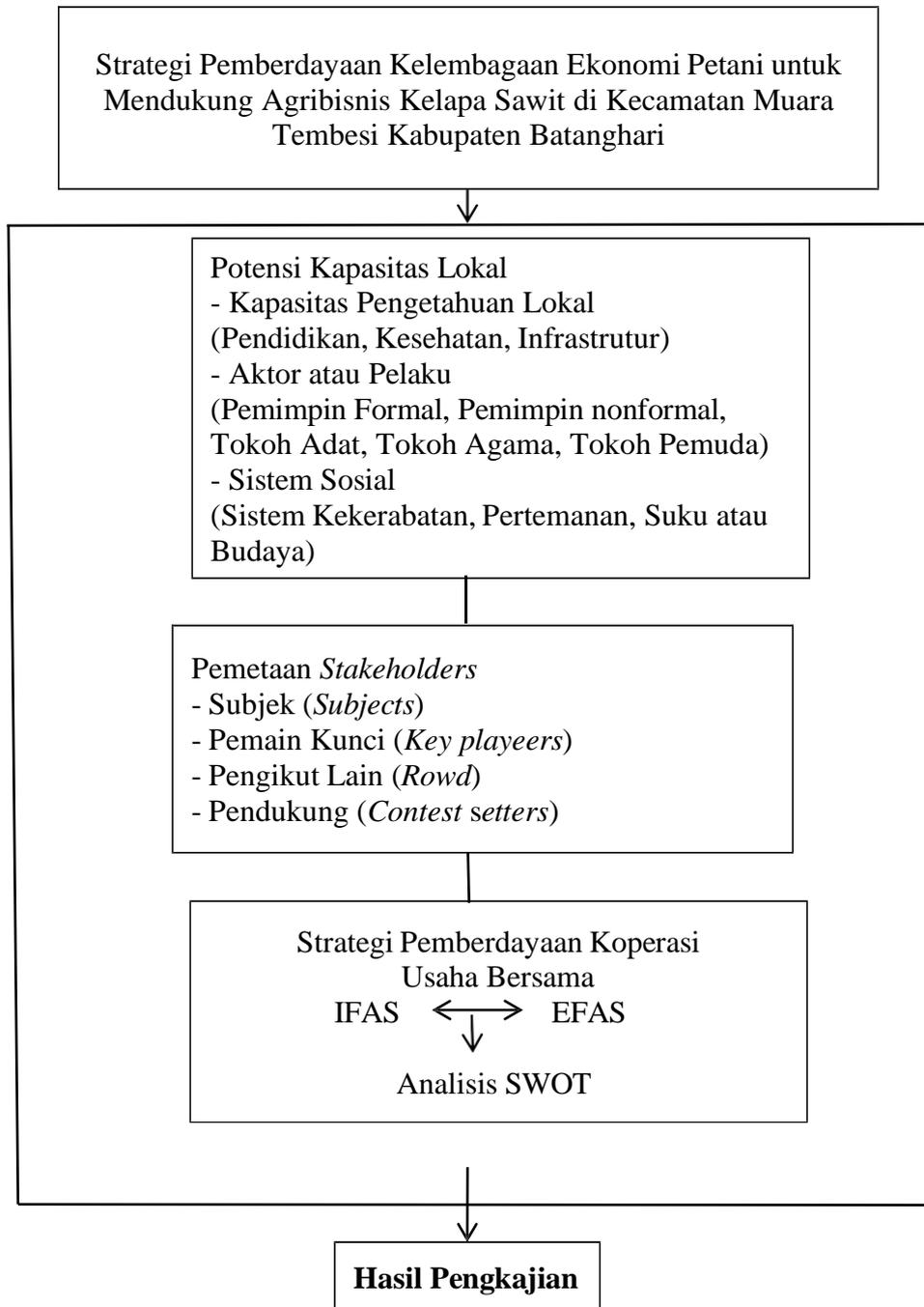
Lanjutan Tabel 1

<p>lokal pemberdayaan kelembagaan ekonomi petani pada program Food Estate di Kabupaten Humbang Hasundutan Regency (Mulyani et al., 2024)</p>	<p>potensi kapasitas lokal dalam pemberdayaan kelembagaan ekonomi petani pada Program Food Estate di Kabupaten Humbang Hasundutan. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Pemberdayaan kelembagaan ekonomi petani.</p>	<p>Metode deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Analisis Data: Melalui reduksi data, penyajian data, kesimpulan, dan verifikasi data untuk memastikan keabsahan informasi.</p>	<p>menemukan bahwa petani di Kabupaten Humbang Hasundutan Memiliki pengetahuan lokal yang baik terkait budidaya, termasuk penentuan jadwal tanam dan penggunaan tanaman herbal sebagai obat alami. Mereka sudah terbiasa mengelola usaha tani berdasarkan pengalaman dan bimbingan penyuluh pertanian Potensi Pengembangan: Potensi kapasitas lokal dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan peningkatan penguasaan teknologi modern. Keberadaan aktor lokal berpengaruh padapenyesuaian kelembagaan ekonomi petani berbasis korporasi.</p>
<p>6. Analisis Kepentingan <i>stakeholder</i> dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Hutan Desa Namo Kecamatan Kulawi</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kepentingan <i>stakeholder</i> dalam pemberdayaan masyarakat Desa Namo di kawasan Hutan Desa berdasarkan tupoksi masing-masing <i>stakeholder</i></p>	<p>Penentuan dalam pengumpulan sampel dengan menggunakan kuisioner dan wawancara mendalam (<i>indepth interview</i>), responden dipilih secara sengaja dengan menggunakan (<i>purposive sampling</i>). Analisis <i>stakeholder</i> digunakan untuk menganalisis tingkat pengaruh dan kepentingan</p>	<p>Kepentinganstakeholder dalam pemberdayaan masyarakat yaitu melakukan program kerja dan melakukan penguatan kapasitas masyarakat sesuai tupoksi. Stakeholder yang berada pada posisi <i>Key Player</i> yaitu Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) Sigi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sigi, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Sigi. Stakeholder yang berada pada posisi Subjek yaitu BPDAS HL Palu-Poso dan Lembaga Swadaya Masyarakat</p>

Lanjutan Tabel 1

stakeholder. dan kepentingan dengan mengklasifikasi kan stakeholder ke dalam <i>key player</i> , <i>context setter</i> , <i>subject</i> dan <i>crowd</i> .	(IMUNITAS). Stakeholder yang berada pada posisi <i>Crowd</i> yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (Yayasan JEMBATA), dan stakeholder yang berada pada posisi <i>Context Setter</i> adalah Lembaga Adat Namu.
--	--

2.3 Kerangka Pikir



Ket :

— = Berhubungn

□ = objek yang dikaji

Gambar 2. Kerangka Pikir